

MI
NNAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN PENERIMAAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI DAERAH KABUPATEN LAHAT**



**Diajukan Oleh :
RENO MARECO
01013120006**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
SARJANA EKONOMI**

2005

4 07

c.1/1

S
352.18407
Kar
a
C050817
2005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**



SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN PENERIMAAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI DAERAH KABUPATEN LAHAT



R. 12019
1. 12296

Diajukan Oleh :
RENO MARECO
01013120006

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
SARJANA EKONOMI
2005

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Reno Mareco**
Nim : **01013120006**
Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**
Mata Kuliah : **Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**
Judul : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan
Retribusi Parkir Dan Penerimaan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan Di Daerah Kabupaten Lahat.**

Telah Di Setujui Oleh Panitia Pembimbing Skripsi

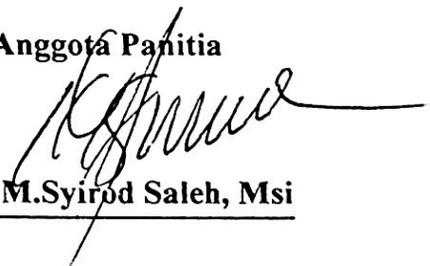
Ketua Panitia



Dr. Syamsurijal, AK

Nip

Anggota Panitia



Drs. M. Syirod Saleh, Msi

Nip

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi
Parkir Dan Penerimaan Retribusi Izin mendirikan Bangunan Di
Daerah Kabupaten Lahat.**

**Telah Dipertahankan Di Ujian Komperensif
Tanggal 20 Januari 2005
Bidang Studi Ekonomi Pembangunan**

**Oleh :
RENO MARECO
01013120006**

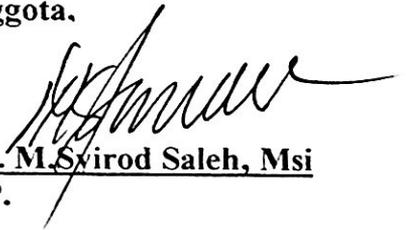
PANITIA UJIAN KOMPERENSIF

Ketua,



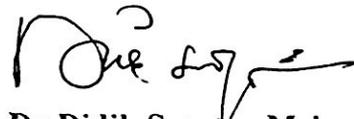
**Dr. Syamsurijal, AK
NIP.**

Anggota.



**Drs. M. Syirod Saleh, Msi
NIP.**

Anggota



**Dr. Didik Susetwo, Msi
NIP.**

Motto :

“ Kegagalan adalah suatu kesuksesan yang tertunda.”

*“ Ya Tuhanku, Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat,
wafatkanlah aku dalam islam dan gabungkanlah aku
dengan orang – orang yang saleh.”*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Dien-ku (Al-Islam) dan Kitab-ku (Al-Quran)*
- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- *Ayukku Rolly Yang Tersayang*
- *Teman-temanku Yang Selalu Membantuku
Dan*
- *Almamaterku*

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir Dan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di daerah Kabupaten Lahat “ yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini sepenuhnya disadari, bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak DR.Syamsurijal.AK, dan Bapak Drs.M.Syirod Saleh.Msi. Serta DR.Didik Susetyo.Msi yang telah membimbing, memberikan petunjuk dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
4. Drs. Suhel.Msi, selaku pembimbing akademik.

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan di Lingkungan Fakultas Ekonomi, UNSRI.
6. Orang tua, dan Ayukku yang selalu kurindukan yang mendoakan, memberi motivasi dan semangat meskipun jauh di sana.
7. Herianto.SE.mo kasih yo mang atas bantuannya mau bela-belain yita waktunya untuk minjamin skripsi temennya.
8. Tedy (EP 02'), thanks Ted atas semua bantuan Print gratisnya.kuliah yang bener jangan pacaran terus.ok Friend
9. Rekan bareng ujian komperensif : Eliana, Nuke, Dwi, Ully, and Mr Bobi. Alhamdulillah kita lulus semua friend meskipun waktu itu kita semua kayak cacing kepanasan
10. Tak lupa teman – temanku : Po, Denny, Nopay, Nita, Hadi and Didi thanks ya atas doa dan dukungannya serta seluruh mahasiswa Jurusan Ekonomi pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan hingga selesainya skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Februari 2005

Penulis

Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Parkir Dan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Daerah Kabupaten Lahat

Oleh :

RENO MARECO

01013120006

ABSTRAK

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir dan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten lahata, dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kendaraan dan luas areal parkir terhadap penerimaan retribusi parkir di kota Lahat dan seberapa besar pengaruh jumlah bangunan dan luas tanah bangunan terhadap penerimaan izin mendirikan bangunan dikabupaten lahata. data yang ada di uji dengan menggunakan analisa regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melalui pengujian hipotesis t-test bahwa jumlah kendaraan dan luas areal parkir mempunyai pengaruh yang erat atau signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir dikota Lahat, sedangkan untuk penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan hanya jumlah bangunan yang mempunyai pengaruh yang erat atau signifikan terhadap penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan sedangkan untuk luas tanah bangunan tidak mempunyai pengaruh yang erat atau signifikan terhadap penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan . dalam penelitian ini juga memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan didaerah kabupaten lahata, dan usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan dikota lahata, diantaranya adalah untuk penerimaan retribusi parkir dapat diterapkan sistem waktu dalam perparkiran dan menaikkan tarif parkir sedangkan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan diantaranya adalah memberikan penyuluhan akan pentingnya membayar retribusi izin mendirikan bangunan terlebih dahulu sebelum mendirikan bangunan dan menyederhanakan kembali syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin mendirikan bangunan.

**The Analysis Factor's Who to Influence Reception Parkir
Retribution And Reception Permission To Build Construction
Retribution in Area Residence Lahat**

Oleh :

RENO MARECO

01013120006

ABSTRAK

The research about the analysis factor's who to influence reception parkir retribution and reception permission to build construction retribution in area residence Lahat, to perform for to know as much as influence carriage total and wide parkir place against reception parkir retribution in Lahat city and for to know as much as influence construction total and wide construction land against reception permission to build construction retribution in area residence Lahat. the datas were analyzed with regresi double linear, the result of this research indicated that with to pass experiment hipotesis t-test taht for carriage total and wide parkir place have influence fixed or significant against reception parkir retribution in lahat city, whereas for reception permission to build construction retribution just construction total who have influence fixed or significant against reception permission to build construction retribution, whereas for wide construction land not have influence fixed or significant against reception permission to build construction retribution in area residence Lahat. Inside research that also to give explain right factor's who to couse low reception parkir retribution and reception permission to build construction retribution in area residence Lahat and care who to be able doings goverment for increase reception parkir retribution and reception permission to build construction retribution in area residence Lahat, among other thing for reception parkir retribution to be able free time system and raise tariff parkir whereas care for increase reception permission to build construction retribution among other thing to give information and economize come back manners and customs propose permission to build construction.

KATA PENGANTAR

Pembangunan di Indonesia bertujuan melaksanakan pembangunan daerah yang merata disegala bidang. Pembangunan ini membutuhkan biaya, pembiayaan tersebut dapat diperoleh dari sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang bersangkutan.

Semakin meningkatnya kegiatan pemerintah menyebabkan semakin besarnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah tersebut. adapun sumber dana pembangunan yang berasal dari daerah yang bersangkutan adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan-perusahaan daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. retribusi daerah kabupaten lahut sampai dengan tahun anggaran 2003 memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, karena retribusi daerah disini merupakan pendapatan terbesar kedua setelah pajak daerah.

Retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan merupakan salah satu komponen dari retribusi daerah. Yang mana masing-masing retribusi tersebut mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap retribusi daerah.

Hasil penerimaan retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan tentu saja tidak lepas dari factor-faktor yang mempengaruhinya. Dimana salah satunya factor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi parkir antara lain jumlah kendaraan dan luas areal parkir, sedangkan jumlah bangunan dan luas tanah

bangunan merupakan factor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan.

Melalui tulisan ini, ingin dijelaskan mengenai bagaimana pengaruh jumlah kendaraan dan luas areal parkir terhadap penerimaan retribusi parkir dan pengaruh jumlah bangunan dan luas tanah terhadap penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan, factor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten Lahat dan usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten Lahat.

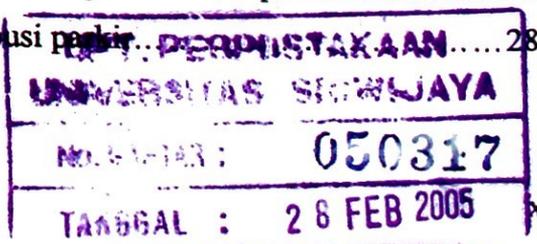
Dalam tulisan ini telah dilakukan, sebaik mungkin dengan segenap kemampuan yang ada, namun tentu saja belum sempurna seperti yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Februari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar isi.....	x
Daftar tabel.....	xiv
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan penelitian.....	6
1.4 Kerangka pemikiran.....	7
1.5 Metode penelitian.....	17
1.5.1 Ruang lingkup penelitian.....	17
1.5.2 Metode pengumpulan data.....	18
1.5.3 Teknik analisis.....	18
1.5.4 Batasan variabel.....	21
BAB 2 Gambaran Umum.....	22
2.1 Gambaran umum Kabupaten Lahat.....	23
2.2 Perkembangan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah Kabupaten lahat.....	24
2.3 Gambaran singkat tentang retribusi parkir.....	28
2.3.1 Objek retribusi parkir dan subjek retribusi parkir.....	28
2.3.2 Cara pemungutan retribusi parkir.....	28



2.3.3	Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir.....	30
2.3.4	Perkembangan jumlah kendaraan berdasarkan dikeluarkanya STNK dikabupaten lahat tahun 1996-2003....	31
2.3.5	Perkembangan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan Umum didaerah kabupaten lahat.....	33
2.3.6	Keadaan umum juru parkir di kabupaten lahat.....	34
2.3.7	Tingkat pendidikan.....	36
2.3.8	Hasil setoran retribusi parkir perharinya.....	37
2.3.9	Luas areal tempat parkir didaerah kabupaten lahat.....	38
2.3.10	Jumlah rata-rata kendaraan yang parkir perharinya.....	39
2.4	Gambaran singkat retribusi izin mendirikan bangunan.....	41
2.4.1	Objek dan subjek retribusi izin mendirikan bangunan.....	41
2.4.2	Tata cara dan syarat-syarat pengajuan izin mendirikan Bangunan.....	41
2.4.3	Standar nilai jual bangunan permeter persegi dan besarnya Retribusi bangunan pelengkap.....	43
2.4.4	Jumlah bangunan yang mendapat izin berdasarkan yang Diterbitkan.....	45
2.4.5	Perkembangan luas tanah didaerah kabupaten lahat.....	46
2.4.6	Perkembangan retribusi izin mendirikan bangunan Didaerah kabupaten lahat.....	46
BAB 3	Hasil dan Pembahasan.....	50
3.1	Analisis faktor faktor yang mempengaruhi retribusi parkir dan Retribusi izin mendirikan bangunan didaerah kabupaten lahat.....	50
3.1.1	Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap penerimaan Retribusi daerah didaerah kabupaten lahat.....	51
3.1.2	Kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan Terhadap retribusi daerah didaerah kabupaten lahat.....	52

3.1.3	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi parkir Dan retribusi izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten Lahat.....	54
3.1.3.1	Analisis pengaruh jumlah kendaraan dan luas areal parkir terhadap penerimaan retribusi parkir di daerah kabupaten Lahat.....	54
3.1.3.2	Analisis pengaruh jumlah bangunan dan luas tanah terhadap penerimaan retribusi izin	
3.2	Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan Retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan Di daerah kabupaten Lahat.....	68
3.2.1	Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan Retribusi parkir di daerah kabupaten Lahat.....	68
3.2.2	Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan Retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten Lahat.....	71
3.3	Usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten Lahat.....	72
3.3.1	Usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di daerah kabupaten Lahat	72
3.3.2	Usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk Meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan Bangunan di daerah kabupaten Lahat.....	75
BAB 4	Kesimpulan dan Saran	77
4.1	Kesimpulan.....	77
4.2	Saran.....	80

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

2.1	Perkembangan pendapatan asli daerah kabupaten lahat dari tahun anggaran 1996 sampai dengan 2003.....	25
2.2	Perkembangan penerimaan retribusi daerah kabupaten lahat dari tahun anggaran 1996 sampai dengan 2003.....	27
2.3	Struktur dan besarnya tariff retribusi parkir.....	30
2.4	Perkembangan jumlah kendaraan berdasarkan dikeluarkan STNK Dikabupaten lahat dari tahun 1996-2003.....	31
2.5	Perkembangan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum Didaerah kabupaten lahat dari tahun anggaran 1997 s/d 2003.....	33
2.6	Jumlah dan prosentase juru parkir dikota lahat menurut lokasi Parkir dikota lahat.....	35
2.7	Jumlah dan prosentase juru parkir dikota lahat.....	36
2.8	Jumlah hasil setoran retribusi parkir perharinya.....	37
2.9	Luas areal parkir didaerah kabupaten lahat.....	38
2.10	Jumlah rata-rata kendaraan parkir perharinya.....	40
2.11	Jumlah bangunan yang mendapat izin berdasarkan yang diterbitkan didaerah kabupaten lahat dari tahun anggaran 1997 s/d 2003.....	45
2.12	Perkembangan luas tanah bangunan didaerah kabupaten lahat.....	46
2.13	Perkembangan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan Didaerah kabupaten lahat dari tahun anggaran 1997 s/d 2003.....	48

3.1	Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap penerimaan retribusi daerah didaerah kabupenn lahat dari tahun 1997 s/d 2003.....	51
3.2	Kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan Terhadap retribusi daerah di kabupaten lahat dari tahun 1997 s/d 2003.....	53
3.3	Jumlah luas areal parkir dan jumlah kendaraan serta hasil setoran Retribusi parkir perhari dikota lahat.....	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dimana agar daerah tersebut dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹

Dengan ditetapkannya otonomi daerah pada tahun 1999 pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah harus dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Sektor-sektor yang dapat digali dan dimanfaatkan secara bebas oleh pemerintah daerah adalah sektor-sektor yang masuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diserahkan pemerintah pusat untuk dipungut oleh pemerintah daerah, Tekat pemerintah pusat untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam mengelolah daerahnya sendiri dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

¹ M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Andi Yogyakarta, 2001, Hal.38.

Besar kecilnya perolehan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kebanyakan lebih bergantung pada kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatannya, selain itu juga dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki dan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu sendiri.

Didalam pemerintahan kabupaten Lahat, pendapatan daerah dapat digolongkan dalam bentuk pajak dan non pajak, salah satu sumber penerimaan bukan pajak adalah retribusi. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.²

Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah dan penerimaan retribusi daerah didaerah kabupaten Lahat. Penerimaan pendapatan asli daerah dan penerimaan retribusi daerah didaerah kabupaten Lahat dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi . disini dapat kita lihat bahwa penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Lahat pada tahun 1997 mengalami penurunan dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 1996 sebesar Rp.2.955.922.000 turun menjadi Rp.2.780.107.168 tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 1998 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar Rp.2.926.357.501, sampai dengan tahun anggaran 2003 penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Lahat terus mengalami fluktuasi.

² .M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta, 1987, Hal. 94.

Begitu juga halnya dengan penerimaan retribusi daerah dimana dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi . pada tahun 1997 penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan yang mana pada tahun sebelumnya sebesar Rp.1.820.569.000 meningkat menjadi Rp. 1.905.482.600. tetapi pada tahun anggaran berikutnya retribusi daerah mengalami penurunan yaitu menjadi Rp.1.117.271.540. dan selanjutnya retribusi daerah menunjukkan penurunan penerimaannya sebesar Rp2.820.000.000. pada tahun anggaran 2001, tetapi kemudian sampai dengan tahun anggaran 2003 pendapatan asli daerah kabupaten Lahat mengalami kenaikan kembali yaitu terakhir sebesar Rp. 3.580.461.721,10.

Selanjutnya, dampak dengan adanya retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan penggunaan atau permintaan terhadap jasa dan pelayanan maupun produk yang dihasilkan pemerintah, oleh karena itu retribusi tidak seperti halnya pajak, retribusi hanya akan mengurangi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. memang dengan retribusi itu berarti pengeluaran masyarakat akan bertambah, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian di daerah.

Tetapi retribusi akan berpengaruh dalam distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan pembagian beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama.³

³ M. Suparmoko , *Ekonomi Publik untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah* , Edisi Pertama , Andi Yogyakarta , 2001 , Hal .95.

Retribusi parkir dan retribusi Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu retribusi yang merupakan sumber pendapatan yang cukup penting, karena income atau pendapatan yang didapat dalam retribusi parkir merupakan bagian yang dapat digali dari sumber yang berasal dari daerah itu sendiri.

Retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan merupakan retribusi yang mempunyai target dan realisasi yang hampir sama, tetapi tentu saja pengaruhnya terhadap retribusi daerahpun tetap berbeda.

Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan retribusi parkir dan retribusi Izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten Lahat .

Perkembangan penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998 penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan yang semula realisasinya sebesar Rp.55.690.800 menurun menjadi Rp.51.096.200, tetapi pada tahun anggaran berikutnya mengalami peningkatan kembali yaitu sampai tahun 2000 sebesar Rp 62.310.700. sampai dengan tahun anggaran 2003 retribusi parkir terus memperlihatkan peningkatan didalam penerimaannya

Seiring dengan peningkatan taraf hidup penduduk kabupaten Lahat, maka kebutuhan masyarakat akan alat transportasi semakin meningkat pula, daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor semakin bertambah tiap tahunnya. selain itu jumlah kendaraan barang dan angkutan umum juga semakin meningkat.

Peningkatan jumlah kendaraan ini membuat arus lalu lintas menjadi semakin padat, timbulnya kemacetan lalu lintas, meningkatnya kebutuhan akan tempat parkir,

pertambahan jumlah kendaraan yang merupakan salah satu input bagi pengelola parkir ini semakin meningkatkan pemasukan retribusi parkir bagi retribusi daerah

Begitu juga halnya dengan retribusi Izin mendirikan bangunan, penerimaan retribusi Izin mendirikan bangunan juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun . pada tahun anggaran 1997 retribusi Izin mendirikan bangunan hanya mempunyai realisasi sebesar Rp. 38.715.629.penerimaan inipun jauh meningkat dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp.22.192.000, kemudian pada tahun anggaran 1998 mengalami peningkatan menjadi Rp. 52.495.284.dan menurun pada tahun 1999 menjadi Rp.34.747.298,94. Jauh menurun dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp.60.000.000 sama seperti target yang ada didalam retribusi parkir, dan kemudian pada tahun 2000 meningkat kembali menjadi Rp.141.093.610.lagi-lagi target dari realisasi inipun sama seperti retribusi parkir yaitu sebesar Rp.100.000.000.

Dengan masih banyaknya lahan kosong yang ada dikabupaten lahat maka semakin banyak pula penduduk yang ingin mendirikan suatu bangunan baik itu sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha. Dengan meningkatnya hal tersebut diatas maka akan meningkatkan input dalam hal retribusi izin mendirikan bangunan yang hasilnya akan meningkatkan retribusi daerah khususnya pendapatan asli daerah dikabupaten lahat.

Sebagai salah satu sumber penerimaan , retribusi parkir dan retribusi Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu komponen dari retribusi daerah, sedangkan retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah . Berkaitan dengan pendapatan asli daerah salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan asli

daerah di kabupaten Lahat diusahakan agar retribusi parkir dan retribusi Izin mendirikan bangunan dapat lebih ditingkatkan lagi penerimaannya dari tahun ke tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh jumlah kendaraan dan luas areal parkir terhadap penerimaan retribusi parkir di kota Lahat ?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah bangunan dan luas tanah terhadap retribusi izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten Lahat ?
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten Lahat ?
4. Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah kabupaten Lahat untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang ada. Secara umum penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui besarnya pengaruh jumlah kendaraan dan luas tempat parkir terhadap penerimaan retribusi parkir.

2. Mengetahui besarnya pengaruh jumlah bangunan dan luas tanah bangunan terhadap retribusi izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten Lahat.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan di daerah kabupaten Lahat.
4. Mengetahui usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah daerah kabupaten Lahat dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam dunia perekonomian moderen saat ini kita dapat melihat bahwa ada empat kelompok utama dari subyek-subyek ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa, pemerintah atau negara dan subyek luar negeri. Masing-masing subyek ekonomi ini memiliki kegiatan-kegiatan yang umumnya bertujuan untuk memenuhi keinginan atau memberikan kepuasan bagi anggota-anggota dari subyek ekonomi tersebut.

Salah satu pelaku ekonomi yang paling besar peranannya adalah pemerintah atau negara. Pemerintah memiliki beberapa kegiatan seperti pemeliharaan pertahanan dan keamanan, keadilan, pekerjaan umum dan lain sebagainya yang semuanya itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat atau warga negaranya.

Untuk mencapai kesejahteraan yang optimal pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, dana ini diperoleh dari dalam dan luar negeri. penerimaan dari

luar negeri diperoleh dari pinjaman dari negara-negara maju, sedangkan penerimaan dari dalam negeri berupa penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki atau dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Namun sumber-sumber penerimaan pemerintah ataupun cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada pokoknya dapat digolongkan sebagai berikut :⁴

- a. Pajak. Yang dimaksud dengan pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk .
- b. Retribusi. Yang dimaksud dengan retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.
- c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara. Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan-penerimaan pemerintah dari hasil penjualan (harga) barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara.
- d. Denda-denda dan rampasan yang dijalankan oleh pemerintah.

⁴ . M, Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, BPFE, Yogyakarta, 1987, Hal. 94.

- e. Sumbangan dari masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran biaya-biaya perijinan (lisensi), toll atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu seperti dijagorawi.
- f. Pencetakan uang kertas .karena sifat dan fungsinya, maka pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu dan masyarakat .oleh karena itu maka pemerintah juga mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada bank sentral untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah walaupun tanpa jaminan .
- g. Hasil undian negara . dengan undian negara, pemerintah akan mendapatkan dana yaitu selisih antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluaran-pengeluarannya termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut. Undian negara ini baik sifatnya karena harga surat undiannya adalah sangat murah , sehingga mereka yang membelinya tidak begitu merasakan rugi kalau tidak memperoleh kemenangan, tetapi sekedar menyumbang kepada pemerintah, sedangkan yang menang akan sungguh-sungguh merasa senang.
- h. Pinjaman. Pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri . pada umumnya negara-negara sedang berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunannya sebagian besar dari pinjaman ini.
- i. Hadiah. Sumber dana jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah, atau dari swasta kepada pemerintah dan dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara kepada

pemerintah negara lain. penerimaan negara dari sumber ini sifatnya adalah volunter dengan tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah dikemukakan sumber-sumber pendapatan negara selanjutnya akan dikemukakan sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1974 disebutkan mengenai sumber pendapatan daerah otonom yaitu dari :⁵

1. Pendapatan asli daerah otonom , yang terdiri atas:
 - Hasil pajak daerah
 - Hasil retribusi daerah
 - Hasil perusahaan daerah
 - Lain-lain usaha daerah yang syah
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri dari:
 - Sumbangan dari pemerintah pusat
 - Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan
3. Lain-lain pendapatan yang syah, seperti sumbangan pihak ketiga dan sebagainya .

jadi pendapatan yang diserahkan atau yang ditunjuk oleh pemerintah pusat meliputi pajak dan retribusi ;sedangkan yang dimaksud subsidi pemerintah

⁵ .M. Suparmoko, *Ekonomi publik, untuk keuangan dan pembangunan daerah*, Edisi pertama, Andi Yogyakarta, 2001, Hal.39.

pusat meliputi sumbangan dari pemerintah pusat dan bagian dari Iuran Pembangunan daerah.

4. Pembiayaan sektoral

Alokasi dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dilaksanakan oleh dinas-dinas provinsi dibawah pengawasan pemerintah pusat.

Retribusi merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah. disini retribusi mempunyai banyak jenis , tetapi dalam hal ini dapat dikelompokan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi.obyek retribusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁶

1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum
2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha yaitu jasa yang menganut sistem komersial
3. Retribusi yang dikenakan pada perijinan tertentu yaitu kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan , pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

⁶ .Suandy.Erly,*Hukum pajak*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Salemba Empat, Jakarta, Hal.144.

Selanjutnya dari ketiga macam obyek retribusi diatas mempunyai kreteria masing-masing yang dapat digunakan.⁷

1. Retribusi jasa umum

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam kelompok jasa umum ,kreteria yang digunakan adalah bahwa:

- a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
- b. Selain melayani kepentingan umum ,jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
- c. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi
- d. Retribusi untuk pelayanan pemerintah itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional.
- e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- f. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas palayanan yang memadai .

⁷ M. Suparmoko,*Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*,Edisi pertama, Andi Yogyakarta,2001, Hal.88.

2. Retribusi jasa usaha.

Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jasa tersebut harus bersifat komersil yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.
- b. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah ,bangunan dan alat-alat berat.

3. Retribusi perijinan

Seperti halnya dengan pajak , retribusi perijinan juga memiliki peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur .lebih tepatnya retribusi perijinan dapat digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan ,pengaturan , pengendalian maupun pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah.

Salah satu jenis retribusi perizinan adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin mendirikan bangunan merupakan salah satu jenis retribusi perizinan yang realisasinya cukup besar didalam retribusi daerah dikabupaten Lahat, retribusi izin mendirikan bangunan inipun dapat digunakan sebagai alat untuk pembinaan, pengaturan, maupun pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah , retribusi menempati urutan kedua terbesar setelah pajak daerah. Oleh karena itu perannya menjadi sangat penting sekali bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan rutinnnya.

Selanjutnya yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah jika memenuhi beberapa hal sebagai berikut.⁸

1. Jenis-jenis retribusi jasa umum , retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu dengan peraturan pemeritah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
3. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian diperuntukan kepada kepala desa dan penetapannya dengan Perda kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Bagi daerah tingkat II pajak dan retribusi parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup penting, karena income yang didapat dari pajak dan retribusi parkir merupakan bagian yang cukup besar dari pendapatan yang digali dari sumber yang berasal dari daerah itu sendiri.

⁸ . Elmi,Bachrul, *Keuangan pemerintah daerah otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, Hal.49.

1.4.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Nossy (1996 : 60) retribusi parkir merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yang potensinya cukup besar , maka pengelolaannya memerlukan perhatian khusus dari pihak pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan retribusi parkir berarti akan menambah sejumlah dana untuk pembangunan ekonomi.

Kemudian selanjutnya menurut Ari,S (1999 : 57) melalui penelitiannya Ia mengungkapkan bahwa seiring dengan meningkatnya taraf hidup penduduk , maka kebutuhan akan alat transportasi semakin meningkat pula dan kemudian akan meningkatkan kebutuhan akan tempat parkir. Pertambahan jumlah kendaraan yang merupakan salah satu input bagi pengelolaan parkir akan semakin meningkatkan pemasukan retribusi parkir, melalui penelitiannya selama periode 1998/1999 – 1998/maret 1999 tentang retribusi parkir dikotamadya Palembang yang mana pada umumnya penerimaan retribusi parkir dari 11 tahun tersebut mengalami peningkatan , bila dibandingkan antara target penerimaan retribusi parkir dengan realisasinya maka pada umumnya realisasi berada dibawah target yang direncanakan.

1.4.2 Teori dan Studi Empirik

Musgrave dan Musgrave (1989: 479) mengemukakan bahwa apabila dalam suatu wilayah yuridiksi mempunyai penerimaan daerah yang tinggi secara relatif dihadapkan dengan kebutuhan yang rendah maka berarti posisi fiskalnya kuat.

Wagner dalam Suparmoko (1992: 24) mengemukakan suatu hukum yang disebut "*law of Ever Increasing State Activity*" (hukum tentang selalu meningkatnya

kegiatan pemerintah). Pengeluaran pemerintah selalau meningkat dalam arti uang maupun riil atau secara absolut maupun relatif dalam perbandingannya dengan pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan pemerintah tersebut antara lain disebabkan oleh perkembangan sosial dan perkembangan industri, seperti adanya perang, kenaikan penghasilan masyarakat, urbanisasi, perkembangan demokrasi, pemborosan dan birokrasi, pemerintah sebagai penggerak dan pelopor pembangunan ekonomi dan timbulnya program kesejahteraan (Suparmoko, 1992: 24-32)

Bagi daerah tingkat II retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah, tingginya pendapatan daerah dari sektor retribusi antara lain disebabkan karena hampir semua retribusi daerah dapat dipungut.

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah didasarkan pada azas-azas sebagai berikut:⁹

1. Penetapan tarif retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya, namun harus memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, agar tetap memelihara kelangsungan pemberian jasa tersebut bagi masyarakat.
2. Pungutan retribusi harus merata tanpa membedakan atau memberikan keistimewaan pada perorangan atau golongan.
3. Pungutan retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya barang ke dalam dan keluar daerah.

⁹ Ratih Nur Pratiwi, Dalam Maizawati, Nossy (Skripsi), *Pokok-pokok Administrasi Keuangan Daerah*, FIA, Malang, 1989, Hal. 71

4. Pungutan retribusi tidak mencari keuntungan yang besar, maka usaha tersebut harus diberi bentuk perusahaan daerah.

Selanjutnya pemungutan retribusi daerah dapat dilaksanakan dengan menggunakan:¹⁰

- a. Karcis atau tanda bukti pembayaran retribusi
- b. Kartu tanda bukti pembayaan retribusi dibubuhkan atau ditempelkan pada kartu adalah retribusi yang pemungutannya berkala (bulanan/mingguan dengan jumlah retribusi tetap)
- c. Surat ketetapan (tanda bukti suatu pembayaran retribusi dibubuhkan atau ditempelkan pada balik retribusi yang pemungutannya berdasarkan atas permohonan dari calon wajib bayar).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup daerah kabupaten Lahat dimana pembahasannya mengenai Analisis Pengaruh jumlah kendaraan dan luas areal parkir terhadap penerimaan retribusi parkir di kota lahath dan pengaruh jumlah bangunan dan luas tanah terhadap penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan didaerah kabupaten lahath, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir dan retribusi Izin mendirikan bangunan didaerah kabupaten lahath dan Usaha-

¹⁰ . *Ibid* .

usaha yang dapat dilakukan pemerintah daerah kabupaten Lahat untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan.



1.5.2 Metode pengumpulan data

1.5.2.1 Data Sekunder

Data yang diolah dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas pendapatan daerah kabupaten Lahat, kantor Bappeda kabupaten Lahat, Badan pusat statistik (BPS), Dinas lalu lintas angkutan jalan raya, Dinas tata pemerintahan serta instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini .

1.5.2.2 Data primer

Data primer ini diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara langsung serta menggunakan kusioner dengan para responden melalui pengajuan daftar isian (berstruktur) dan wawancara tak berstruktur. Data ini menggunakan metode stratified random sampling dimana terjadi pemisahan sampel-sampel dalam suatu populasi dalam penelitian.

1.5.3 Teknik analisis

Dalam menganalisa data yang ada, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu teknik analisis kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kualitatif bersifat deskriptif dan digunakan untuk menjelaskan angka-angka baik dari hasil perhitungan maupun dari tabel yang ada.

Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan perhitungan atas data yang tersedia . dalam analisis ini digunakan alat-alat analisis antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk menghitung kontribusi yang diberikan retribusi parkir dan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap Retribusi Daerah digunakan rumus:¹¹

$$K_s = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$$

K_s = Kontribusi

X_i = Retribusi parkir dan retribusi Izin mendirikan bangunan

Y_i = Retribusi daerah

- b. Untuk menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata dari data yang ada maka dapat digunakan dengan rumus:¹²

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

Keterangan:

P_t = Penerimaan pada tahun akhir

P_o = Penerimaan pada tahun awal

r = Angka pertumbuhan.

n = Waktu antara P_o dan P_t

¹¹ Hg, Suseno Triyanto, *Indikator Ekonomi, Kenisius*, Yogyakarta, 1990, Hal.21.

¹² *Ibid.*

c. Untuk menunjukkan kuat tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat digunakan rumus:

$$\text{Regresi linear} = Y_p = a + b_1JK + b_2LAP \quad 13.$$

Dimana :

Y_p = Retribusi parkir

JK = Jumlah kendaraan

LAP = Luas areal parkir

a dan b adalah Parameter

$$\text{Regresi linear} = Y_{imb} = a + b_1JB + b_2LTB$$

Dimana :

Y_{imb} = Retribusi Izin mendirikan bangunan

JB = Jumlah bangunan

LTB = Luas tanah bangunan

a dan b adalah parameter

$$\text{Korelasi (r)} = \frac{n \cdot \Sigma(XY) - \Sigma X \Sigma Y}{\sqrt{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \sqrt{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}} \quad 14$$

¹³ .Dergibson Siagian, Sugiarto, *Metode Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hal.237.

d. Nilai Uji "t"

Uji t digunakan untuk mengkaji secara variabel apakah benar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat cukup besar . adapun hipotesa yang dapat diuji adalah

$H_0 : b = 0$ H_0 diterima apabila : $t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$

$H_0 : b = a$ H_0 Ditolak apabila : $t\text{-hit} > t\text{-tabel}$

Dimana :

H_0 : Hipotesa nol yaitu tidak adanya hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen), jika variabel tetap.

H_0 : Hipotesa alternatif yaitu adanya hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen)

1.6.4 Batasan Variabel.

1. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Ibid., Hal, 237.

¹⁵ Undang-undang RI , Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.¹⁶
3. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁷
4. Retribusi parkir adalah pungutan daerah dimana si pemakai jasa parkir membayar atas jasa parkir yang diterimanya.
5. Retribusi Izin mendirikan bangunan adalah retribusi pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan.¹⁸
6. jumlah kendaraan diukur berdasarkan jumlah dikeluarkannya STNK.
7. Luas areal parkir diukur berdasarkan meter per segi
8. luas tanah , adalah jumlah luas tanah yang digunakan untuk bangunan.
9. jumlah bangunan yaitu banyaknya bangunan berdiri pada suatu tahun tertentu

¹⁶ .M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek* , BPF, Yogyakarta, 1987, Hal. 94.

¹⁷ .M. Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Andi Yogyakarta, 2001, Hal. 85.

¹⁸ Ibid, Hal.93.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta, 2002.
- M, Suparmoko, *Keuangan Daerah Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi Ke Empat, BPFE, Yogyakarta, 1987.
- Erly, Suandi, *Hukum Pajak*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Penerbit Salemba Empat, 2000.
- Ari,s, *Peranan Retribusi parkir di daerah Kotamadya Palembang*, Universitas Sriwijaya, 1999.
- Elmi, Bachrul, *Keuangan Pemerintah daerah Otonom DiIndonesia*, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Juklak*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2000.
- Maizawati, Nossy, *Skripsi: Sumbangan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Dikotamadya Palembang*, Universitas Sriwijaya, 1996.
- Anto Dayan, *Pengantar Metode Statistik*, Jilid I, LP3ES, Yogyakarta.
- Rencana Strategis (RENSTRA), Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2004-2008, 2004.
- Hg. Suseno, Triyanto, *Indikator Ekonomi*, Kenisius, Yogyakarta. 1990
- Dergibson Siagian, Sugiarto, *Metode Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2002
- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang *Retribusi parkir ditepi jalan umum*, No 24. tahun 2001
- Keputusan Bupati Lahat No.43 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten lahata No 24 tahun 2001 tentang *retribusi parkir ditepi jalan umum*.

Peraturan daerah Kabupaten Lahat no 25 tahun 2004 tentang *garis sempadan dan izin mendirikan bangunan* No 11 tahun 2004.

Keputusan Bupati Lahat No 11 tahun 2004 tentang *Garis Sempadan dan izin mendirikan bangunan*.

Susetyo, Didik, *Kebutuhan, kapasitas, upaya, dan transfer fiskal dalam rangka otonomi daerah*, Universitas Sriwijaya, 2004.